



Bab III

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Hasil Rumusan Masalah Pembangunan Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 dan diupayakan tetap sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional tahun 2017. Dari hasil analisis dan informasi yang tersedia, dan memperhatikan kriteria isu strategis: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki, maka isu-isu strategis Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan RPJMD adalah sebagai berikut adalah:

1. Relatif rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global
2. Pertumbuhan ekonomi bersumber pada kegiatan ekonomi yang rentan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan
3. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan serta pendukung ketahanan pangan
4. Rendahnya aksesibilitas, konektivitas antarwilayah dan keterbatasan ketersediaan infrastruktur mengakibatkan ketertinggalan
5. Kesenjangan wilayah dan ketidakmerataan ruang kegiatan ekonomi berpotensi mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran
6. Terdapatnya kegiatan perdagangan ilegal lintas batas yang mengakibatkan potensi kebocoran ekonomi dan permasalahan sosial
7. Masih terbatasnya ketersediaan dan distribusi energi
8. Belum terpenuhinya pengelolaan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintah dalam mendukung pencapaian *good governance* dan *clean governance*.



9. Degradasi dan risiko lingkungan akibat perubahan tata guna lahan untuk kegiatan ekonomi yang tidak ramah lingkungan

Penanganan isu-isu strategis daerah diperkirakan akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan prioritas yang perlu ditempuh dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
2. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses faktor produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi, penyuluhan dan promosi brand/citra komoditas unggulan daerah;
3. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
4. Peningkatan jaringan jalan;
5. Peningkatan kapasitas/suplai listrik wilayah;
6. Pemerataan akses pendidikan khususnya pendidikan menengah (umum dan kejuruan);
7. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah;
8. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.

3.1.2 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara dihadapkan pada kendala pasokan energi karena disparitas yang tinggi antara sisi permintaan dan penawaran energi. Pada usaha pertambangan batubara, daerah hanya memperoleh penerimaan pajak. Karena pengolahan batubara berada di luar wilayah Provinsi Kalimantan Utara, daerah tidak memperoleh manfaat pada sisi pasokan energi yang bersumber pada batubara. Hal yang sama terjadi pada perusahaan migas. Kalaupun ada pengolahan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, *diseconomies of scale* pada transportasi darat



akibat belum tersambungunya jalur jalan darat di sebagian besar wilayah serta harga minyak dunia yang lebih tinggi di pasar dunia, mengakibatkan daerah harus mendatangkan pasokan BBM dari luar yang penyalurannya juga sekali lagi terkendala oleh *diseconomies of scale* pada transportasi darat. Karena terbatasnya pasokan, sementara permintaan masih lebih tinggi karena BBM juga dibutuhkan pada sisi produksi untuk menggerakkan generator serta pengangkutan hasil sektor pertanian, otomatis akan muncul kelebihan permintaan yang mengakibatkan harga BBM naik pada ke batas *willingness to pay*. Ini menjelaskan mengapa harga BBM dan produk jadi menjadi lebih mahal di daerah perdesaan.

Laju inflasi Kalimantan Utara pada triwulan III 2015 mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 7,55% (yoy) menjadi 7,33% (yoy). Tingkat inflasi tersebut masih berada di atas inflasi nasional yang tercatat sebesar 6,83% (yoy). Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kalimantan, realisasi inflasi Kalimantan Utara berada di atas inflasi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, namun masih di bawah inflasi Kalimantan Barat. Apabila dibandingkan dengan rata-rata inflasi historis triwulan III selama tiga tahun terakhir, tingkat inflasi pada periode kali ini tercatat paling tinggi. Meskipun demikian, pergerakan inflasi Kaltim (termasuk Kalimantan Utara) pada triwulan laporan relatif sejalan dengan pola nasional ke arah level yang lebih baik.

Kinerja fiskal pemerintah daerah di wilayah Kaltara baik dari sisi pendapatan maupun belanja masih belum mencapai target proporsionalnya, persentase capaian realisasi triwulan III 2015 tidak lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja langsung dan belanja tak langsung masih cukup rendah dibandingkan pencapaian pada triwulan sebelumnya. Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah daerah (dan dana dari kementerian/lembaga pemerintah pusat pada triwulan laporan belum mencapai target proporsionalnya sebagai akibat adanya perubahan nomenklatur dan backloading anggaran pada akhir tahun.

Menurunnya kinerja perekonomian daerah terutama di sektor utama seperti sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan, serta melambatnya kinerja sektor pertanian berdampak pada tingkat ketenagakerjaan dan kesejahteraan di sektor-sektor tersebut. Kondisi tersebut terindikasi dari menurunnya ketersediaan lapangan kerja di sektor-sektor tersebut. Meskipun diindikasikan terdapat mutasi mata pencaharian,



namun tingkat penghasilan yang diperoleh dari sektor yang baru (sektor jasa) relatif lebih rendah dibandingkan penghasilan dari ketiga sektor utama sebelumnya.

Perbaikan perekonomian Kaltara pada triwulan IV 2015 masih terbatas seiring dengan prospek ekonomi global dan prospek harga komoditas internasional yang belum membaik. Meskipun demikian, arahnya mulai membaik seiring dengan adanya perbaikan kinerja pada beberapa komponen ekonomi terutama dari sisi investasi, konsumsi dan ekspor antardaerah.

Sementara itu, perekonomian Provinsi Kalimantan Utara Triwulan II-2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 16,12 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 12,47 triliun. Dari sisi pengeluaran, secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Triwulan I hingga Triwulan II tahun 2016 sebesar 0,88 persen (c-to-c) salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya kinerja investasi yang digambarkan oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 5,43 persen. Selain itu, didukung pula oleh pertumbuhan pada komponen net ekspor antar daerah dan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang masing-masing tumbuh sekitar 32,80 persen dan 19,91 persen. Komponen Pengeluaran Konsumsi rumah tangga juga mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 2,85 persen.

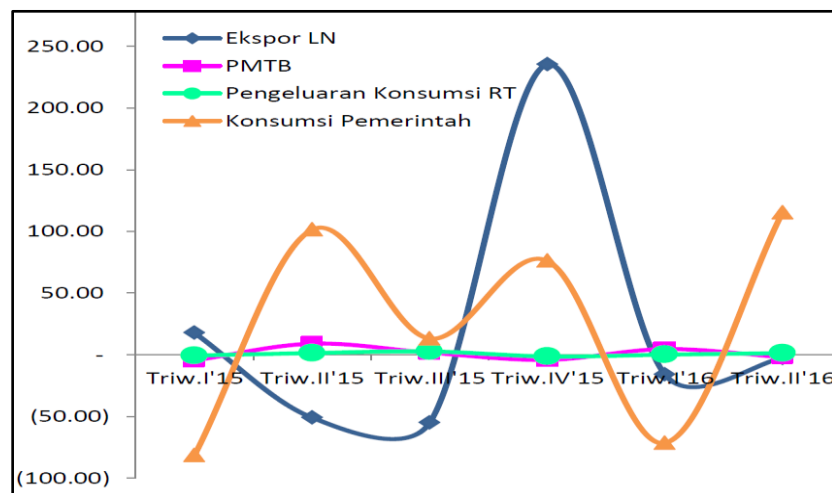
Salah satu komponen yang cukup dominan namun memberi andil dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi adalah komponen Ekspor Luar Negeri yang mengalami kontraksi sebesar negatif 17,83 persen. Karena sebagian besar komponen-komponen dari sisi pengeluaran masih tumbuh positif, walaupun komponen Ekspor Luar Negeri masih berkontraksi, maka secara keseluruhan sudah mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi secara kumulatif di tahun ini sehingga mengalami pertumbuhan ekonomi yang masih positif. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh positif dan merupakan komponen yang paling mendominasi dalam pembentukan PDRB Kalimantan Utara (sekitar 35,68 persen).

Ekonomi Kalimantan Utara triwulan II-2016 mengalami pertumbuhan sebesar 0,88 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan pada komponen pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh signifikan sebesar 115,19 persen. Selain itu

didukung oleh peningkatan kinerja pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan komponen pengeluaran konsumsi LNPRT yaitu masing-masing sebesar 1,37 persen dan 13,57 persen. Sebaliknya ada beberapa komponen yang terkoreksi, dimana terjadi pula penurunan pada dua komponen yang dominan terhadap pembentukan PDRB Kalimantan Utara dari sisi pengeluaran pada triwulan ini yaitu komponen Ekspor Luar Negeri yang terkoreksi sebesar negatif 2,78 persen dan Komponen PMTB yang terkoreksi sebesar negatif 1.85 persen.

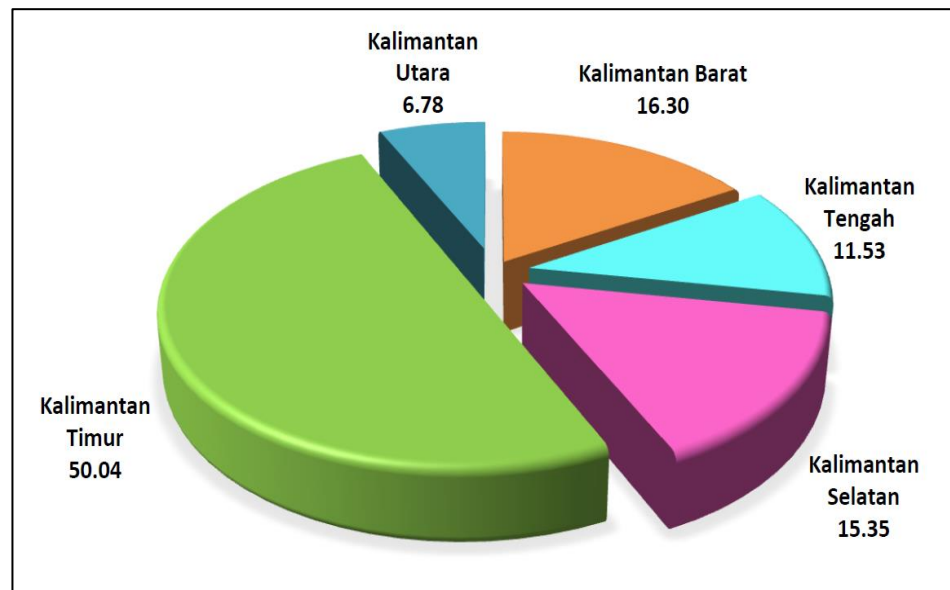
Gambar 3.1

Pertumbuhan Beberapa Komponen PDRB Pengeluaran secara (QoQ)



Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan, maka pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian Provinsi Kaltara Triwulan II tahun 2016 masih lebih rendah dari provinsi yang lain. Hal ini dapat dimaklumi mengingat Provinsi Kaltara merupakan DOB. Kinerja perekonomian di Pulau Kalimantan secara umum pada Triwulan II- 2016 tumbuh sebesar 1,13 persen dibandingkan triwulan II-2015 (y-on-y). Sedangkan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), kinerja ekonomi Pulau Kalimantan mengalami pertumbuhan sebesar 1,02 persen.

Gambar 3.2
Struktur Ekonomi Pulau Kalimantan, Triwulan II-2016
Berdasarkan Perhitungan PDRB



3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017

Kebijakan-kebijakan yang mendasari APBD 2017 ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, utamanya untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan dengan tetap menjaga keseimbangan dengan upaya menjaga daya tahan fiskal dan pengendalian risiko. Namun demikian, keberhasilan untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut sangat dipengaruhi berbagai dinamika, baik yang terjadi di tingkat global maupun domestik yang merupakan tantangan sekaligus peluang.

Pertama, dinamika ekonomi global, yaitu belum pulihnya perekonomian global dan harga komoditas. Meskipun perkembangan ekonomi global di tahun 2017 diproyeksikan akan membaik, namun Pemerintah Daerah tetap mewaspadaikan berbagai tantangan global yang diperkirakan akan dihadapi di sepanjang tahun 2017. *Pertama*, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang diproyeksikan masih akan terus berlanjut. Perlambatan ekonomi di Tiongkok merupakan dampak dari proses transisi perubahan sumber pertumbuhan ekonomi Tiongkok dari sektor investasi ke sektor konsumsi dan jasa serta masih lemahnya aktivitas perdagangan dunia. Mengingat Tiongkok merupakan salah satu



negara mitra dagang utama Indonesia, maka dampaknya akan langsung dirasakan melalui turunnya aktivitas ekspor impor antar negara. *Kedua*, masih lemahnya harga komoditas utama sebagai akibat dari turunnya permintaan dan lemahnya ekonomi dunia. Sebagai salah satu daerah penyumbang PDRB yang sebagian besar masih bertumpu pada ekspor komoditas khususnya migas dan batubara, maka Kaltara masih harus menghadapi risiko belum membaiknya harga minyak dunia yang telah mengalami penurunan drastis sejak tahun 2011. Meski diperkirakan membaik, namun peningkatan harga minyak dunia ke depan diperkirakan akan terbatas dengan laju yang relatif lambat. *Ketiga*, masih berlanjutnya ketidakpastian perekonomian global akibat dinamika di berbagai negara maju. Membaiknya perekonomian Amerika Serikat di tahun 2017 diperkirakan akan membawa konsekuensi di sektor keuangan melalui risiko normalisasi suku bunga, yang akan mempengaruhi arus modal masuk ke *emerging market economies*. Disamping itu, terdapat potensi perubahan kebijakan ekonomi pasca pemilihan umum di Amerika Serikat pada akhir tahun 2016. Hasil referendum Brexit juga akan memberikan tambahan risiko pada perekonomian global. Hal ini terutama jika Brexit berdampak pada perekonomian Eropa yang akan menimbulkan efek lanjutan pada perekonomian negara-negara lain termasuk Indonesia. Selain itu, berlakunya MEA juga memberikan peluang dan tantangan tersendiri, mengingat MEA akan membuka peluang yang lebih luas bagi peningkatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun juga menimbulkan tantangan yaitu meningkatnya persaingan bagi produk-produk Indonesia yang relatif sejenis dengan produk negara-negara ASEAN.

Kedua, pengelolaan kebijakan fiskal. Dalam rangka menghadapi berbagai tantangan perekonomian global dan memitigasi dampaknya terhadap perekonomian domestik, Pemerintah Daerah diharapkan akan terus berupaya memperkuat fondasi perekonomian agar mampu bertahan dan tetap tumbuh secara berkesinambungan. Untuk itu, dalam tahun 2017 belanja daerah agar lebih terarah yang dapat secara efektif meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dengan fokus untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah, serta kegiatan ekonomi produktif. Kebijakan anggaran yang ekspansif untuk mendorong perekonomian tersebut harus selaras dengan upaya untuk menjaga kesinambungan ekonomi daerah dalam jangka menengah dan sesuai dengan ketersediaan anggaran, mengingat pendapatan negara tahun 2017



sangat dipengaruhi kinerja pendapatan negara tahun 2016 yang kurang optimal dan berimplikasi terhadap menurunnya dana transfer ke daerah.

Pada sisi belanja daerah, tantangan terbesar pada tahun 2017 adalah mewujudkan kebijakan belanja yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas, efektivitas dan efisiensi belanja, serta pengendalian risiko dalam perspektif jangka pendek, menengah, maupun panjang. Efektivitas belanja daerah mendapatkan tantangan, antara lain pola dan tingkat penyerapan anggaran belanja yang belum optimal, ketepatan penyaluran subsidi yang perlu ditingkatkan, dan pemenuhan anggaran belanja wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*). Selanjutnya, tantangan dalam pembiayaan anggaran adalah upaya untuk mencari sumber pembiayaan dengan biaya yang lebih murah, tidak menimbulkan *crowding out*, mendorong *financial deepening*, serta menjaga kesinambungan ekonomi, seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan pembiayaan anggaran.

Ketiga, pembangunan sektor riil. Beberapa tantangan pembangunan domestik yang perlu menjadi perhatian utama adalah struktur dan kelembagaan perekonomian yang perlu ditingkatkan kualitasnya, seperti terbatasnya kapasitas produksi dan rendahnya daya saing, masih kurangnya inovasi dan rendahnya tingkat teknologi, kesenjangan ekonomi, dan kedaulatan pangan.

Perekonomian daerah masih menghadapi keterbatasan kapasitas produksi dan daya saing sebagai konsekuensi dari terbatasnya ketersediaan infrastruktur, pasokan energi, serta kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, Pemerintah akan mendorong kapasitas sektor UKM agar tumbuh dan mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri lokal diupayakan melalui pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif, inovasi dan akses terhadap sumber teknologi, serta memanfaatkan jaringan produksi global (*global production network*). Di samping itu, akses masyarakat terhadap pembiayaan akan dipermudah khususnya bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sehingga dapat mendorong tumbuhnya sektor riil secara lebih nyata.

Pada sisi lain, struktur perekonomian domestik dengan permintaan dan konsumsi *domestic* yang tinggi akibat peningkatan kelompok masyarakat berpendapatan menengah dengan daya beli yang cukup kuat harus diimbangi dengan sisi produksi. Sehingga peningkatan investasi dan



aktivitas produksi adalah tantangan struktural yang harus segera dibenahi, dan butuh dukungan infrastruktur, energi, kualitas sumber daya manusia, teknologi serta sumber pembiayaan yang memadai. Hal lain yang menjadi permasalahan utama dari pembangunan daerah adalah masih rendahnya tingkat produksi barang-barang yang mempunyai nilai tambah tinggi, sehingga diperlukan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi daerah telah berhasil mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai oleh tren penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Meskipun angka kemiskinan cenderung menurun, namun terdapat kecenderungan dimana golongan bawah mengalami pertumbuhan lebih rendah dibandingkan golongan atas. Hal ini berarti capaian pertumbuhan ekonomi masih dibayangi oleh terjadinya kesenjangan pembangunan antarwilayah, karena distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut wilayah yang masih didominasi oleh Provinsi di Sumatera-Jawa-Bali yakni sekitar 80 persen dari total PDB.

Sementara itu, tantangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan tetap penting, mengingat kebutuhan pangan domestik yang terus meningkat untuk mengimbangi peningkatan laju jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah penduduk tersebut membutuhkan pemenuhan kebutuhan pangan domestik sebagai salah satu prasyarat bagi pelaksanaan pembangunan.

Dengan potensi yang dimilikinya serta perkiraan dinamika lingkungan yang mempengaruhi, perekonomian Kalimantan Utara diperkirakan akan tumbuh positif hingga tahun 2017. Membaiknya kualitas infrastruktur diperkirakan akan diikuti meningkatnya minat investor dalam mengembangkan industri pengolahan sumber daya mineral maupun pertanian di Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan Malaysia, tepatnya bagian Sabah dan Serawak. Letak geografis Provinsi Kalimantan Utara cukup strategis dan menguntungkan karena dilalui oleh Alur Laut Kawasan Indonesia II (ALKI II) yang sering dilalui oleh kapal asing yang berlayar ke perairan Indonesia.

Berdasarkan kinerja pembangunan selama ini dan modal pembangunan yang dimiliki, prospek pembangunan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015 dalam mendukung pencapaian target utama RPJMD 2016-2021 dan RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:



1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dikisaran 6,0 persen. Dengan kinerja ekonomi yang semakin membaik berkat meningkatnya produksi pertanian dan aktivitas pertambangan setelah diberlakukannya ijin ekspor mineral bagi para penambang besar, diperkirakan tahun 2017 prospek pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia lebih meningkat dibandingkan tahun 2016 yaitu tumbuh pada kisaran 5,6 – 6,1 persen. Kinerja Provinsi Kalimantan Utara diperkirakan mendorong prospek yang membaik ini, didukung oleh membaiknya kinerja di sektor pertambangan dan industri pengolahan dan adanya peningkatan produktivitas kelapa sawit seiring dengan masuknya panen sawit dan mulai berproduksinya lahan baru yang dapat mendukung meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
2. Penurunan Angka Kemiskinan menjadi 5,7 persen. Untuk itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Selama kurun waktu 2013 - 2019 Provinsi Kalimantan Utara harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 6,41 poin persentase atau 0,91 poin persentase per tahun.
3. Pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty) mampu meningkatkan penerimaan negara sehingga daerah optimis pendapatan daerah tahun 2017 yang bersumber dari dana transfer dapat meningkat.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Dalam upaya mencapai pembangunan daerah memerlukan dukungan penganggaran yang berasal dari berbagai sumber, antara lain dari Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari: Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Perusda dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Selain itu juga dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum. Anggaran Pendapatan Daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Perangkat Daerah penghasil Pendapatan Daerah.

Kerangka pendanaan disusun untuk memberikan gambaran proyeksi kinerja pendapatan yang akan berpengaruh terhadap kebijakan



pembangunan yang akan diambil pemerintah daerah selama kurun waktu lima tahun mendatang. Kemampuan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk mendanai pembangunan daerah pada lima tahun mendatang diprediksikan mengalami peningkatan, namun relatif kecil. Pendapatan daerah diproyeksi secara moderat dengan rata-rata pertumbuhan antara 10,38%-13,88% untuk PAD, sekitar 7,76%-9,66% untuk dana perimbangan, dan sebesar 13,00%-16,55% untuk lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu penerimaan pembiayaan terutama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun lalu untuk menutup defisit anggaran.

Dengan memperhatikan kinerja selama lima tahun yang lalu, pengeluaran belanja tidak langsung yang bersifat wajib dan mengikat di Provinsi Kalimantan Utara yang paling besar adalah pada belanja pegawai, diproyeksikan rata-rata tumbuh sebesar 6%. Peningkatan belanja pegawai dipengaruhi oleh peningkatan gaji berkala, gaji ke-13 dan penambahan cadangan sekitar 2,5% dengan catatan tidak terjadi keputusan dari pemerintah mengenai kenaikan gaji pegawai. Belanja tidak langsung lainnya yang cukup besar adalah belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, ditetapkan tidak mengalami kenaikan dengan harapan meningkatkan pembangunan di wilayah perdesaan. Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa diprediksikan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan perolehan pajak daerah. Sementara itu belanja bunga diperkirakan tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah dan pinjaman daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAK, DAU dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun realisasi dan proyeksi / target Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 – 2016 adalah sebagai berikut :



Tabel 3. 1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara

No.	Uraian	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	391.356.851.032,91	1.513.352.878.113,48	1.444.520.032.238,32	141,07
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.356.851.032,91	11.833.885.267,48	370.184.985.159,32	1.900,17
1.1.1.	Pajak daerah	-	-	305.686.568.264,00	-
1.1.2.	Retribusi daerah	-	-	142.065.600,00	-
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	1.356.851.032,91	11.833.885.267,48	64.356.351.295,32	608,00
1.2.	Dana Perimbangan	-	1.228.625.712.846,00	910.439.345.079,00	-
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	-	1.199.836.456.846,00	199.244.097.079,00	-
1.2.2.	Dana alokasi umum	-	20.567.986.000,00	651.247.428.000,00	-
1.2.3.	Dana alokasi khusus	-	8.221.270.000,00	59.947.820.000,00	-
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	390.000.000.000,00	272.893.280.000,00	163.895.702.000,00	-34,99
1.3.1	Hibah	390.000.000.000,00	200.000.000.000,00	71.538.702.000,00	-56,47
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya (***)	-	-	-	-
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	-	72.893.280.000,00	92.331.430.000,00	-
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-
1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	-	25.570.000,00	-

Sumber: Dispenda Provinsi Kalimantan Utara

3.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2017 meliputi :

- a. Optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;



- b. Optimalisasi pemanfaatan/pemberdayaan aset daerah;
- c. Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak dan pembaharuan data;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- e. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak;
- f. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta

Kebijakan tersebut ditempuh melalui penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel; menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberi kontribusi pada PAD; peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain.



Tabel 3. 2

Proyeksi/Target Penerimaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara

No	Uraian	Proyeksi RKPD Tahun 2016 (Rp)	Proyeksi RKPD Tahun 2017 (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	PENDAPATAN	1.947.581.153.983,80	2.009.252.567.178,80	61.671.413.195
1.1	Pendapatan Asli Daerah	320.047.452.983,80	433.822.746.458,80	103.775.293.475
	Pajak Daerah	309.797.452.983,80	326.482.746.458,80	16.825.293.475
	Retribusi Daerah	-	-	
	Lain-Lain PAD yang sah	10.250.000.000,00	10.720.000.000,00	86.950.000.000
1.2	Dana Perimbangan	1.529.733.901.000,00	1.585.429.820.720,00	55.695.919.720
	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	317,317,612,000.00	320.490.788.120,00	3.173.176.120
	Dana Alokasi Umum	1,032,459,159,000.00	1.084.082.116.950,00	51.622.957.950
	Dana Alokasi Khusus	179,957,130,000.00	180.856.915.650,00	899.785.650
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	97,799,800,000.00	98.777.798.000,00	977.998.000
	Hibah	-	-	
	Dana Darurat	-	-	
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	97,799,800,000.00	98.777.798.000,00	977.998.000
	Dana Insentif Daerah	5.000.000.000,00		(5.000.000.000)
	Dana Transfer Lainnya	92,799,800,000.00	98.777.798.000,00	5.977.998.000
	Total Pendapatan (a)	1,947,581,153,983.80	2,009,252,567,178.80	61.671.413.195,00
2	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	
	Pengembalian Utang	-	-	
	Penerimaan Piutang	-	-	
	Jumlah (b)	-	-	
3	Proyeksi Silpa Riil			
	Saldo kas neraca daerah			
	Dikurangi:			
	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan			
	Kegiatan lanjutan			
	Jumlah (c)			
	Jumlah Kapasitas Keuangan Daerah (a) + (b) + (c)			

Sumber: Dispenda Provinsi Kalimantan Utara & Biro Keuangan dan Aset

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2017 serta berkontribusi terhadap capaian RPJMD tahun 2017, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang diarahkan untuk:

- a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja BLUD dan pendampingan DAK;



- b. Pemenuhan Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota;
- c. Mengusahakan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan;
- d. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017, meliputi:
 - Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
 - Percepatan pembangunan infrastruktur dasar diseluruh wilayah;
 - Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan sosial dasar;
 - Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah.
- e. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional;
- f. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah Kabupaten/Kota melalui Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut:



Tabel 3. 3
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2014 s/d Tahun 2018
Provinsi Kalimantan Utara

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Tahun Berjalan 2016	Proyeksi /Target pada Tahun 2017	Proyeksi /Target pada Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	11.833.885.267,48	370.186.004.272,32	417.047.452.983,80	419.868.015.909,00	428.265.376.227,18
1.1.1	Pajak daerah	0	305.686.568.264,00	309.797.452.983,80	293.334.558.388,00	299.201.249.555,76
1.1.2	Retribusi daerah	0	142.065.600,00	50.000.000,00	140.000.000,00	142.800.000,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	11.833.885.267,48	64.357.370.408,32	10.000.000.000,00	126.393.457.521,00	128.921.326.671,42
1.2	Dana Perimbangan	1.301.518.992.846,00	1.002.770.775.079,00	1.529.733.901.000	1.800.696.737.000	1.836.710.671.740,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	1.199.836.456.846,00	291.575.527.079,00	317.317.612.000,00	329.295.149.000,00	335.881.051.980,00
1.2.2	Dana alokasi umum	20.567.986.000,00	651.247.428.000,00	1.032.459.159.000,00	1.163.384.773.000,00	1.186.652.468.460,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	8.221.270.000,00	59.947.820.000,00	179.967.130.000,00	308.0166.815.000,00	314,177,151,300,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	272.893.280.000,00	163.895.702.000,00	98.295.000.000,00	114.588.229.671,00	116.879.994.264,42
1.3.1	Hibah	200.000.000.000,00	71.583.702.000,00	495.200.000,00	969.480.000,00	988.869.600,00
1.3.2	Dana darurat	0	0	0	0	0
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	0	0	0	0	0
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	72.893.280.000,00	92.331.430.000,00	92,799,800,000,00	7.500.000.000,00	7.650.000.000
1.3.6	Pendapatan Lainnya	0	0	0	106.118.749.671,00	108.241.124.664,42
A	JUMLAH PENDAPATAN	1.513.352.878.113,48	1.444.521.051.351,32	2.045.076.353.983,80	2.335.152.982.580,00	2.381.856.042.231,60
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja pegawai	46.206.963.498,00	109.938.425.365,00	111,037,809,618.65	544.903.601.399,44	548.255.309.409,88
2.1.2	Belanja bunga	0	0	0	7.150.492.707,00	7.293.502.561.14
2.1.3	Belanja subsidi	0	0	0	18.000.000.000,00	18.360.000.000,00
2.1.4	Belanja hibah	94.624.945.000,00	248.342.542.745,81	250,825,968,173.27	228.199.000.000,00	232.762.980.000,00
2.1.5	Belanja bantuan social	0	0		4.000.000.000,00	4.080.000.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	0	83.619.643.705,33	84,455,840,142.38	133.939.198.286,00	136.617.982.251,72
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	0	266.010.999.792,41	268,671,109,790.33	68.248.000.000,00	192.041.520.000,00
2.1.8	Belanja tidak terduga	400.000.000,00	500.000.000,00	505,000,000.00	10.000.000.000,00	10.200.000.000,00
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	141.231.908.498,00	708.401.111.608,55	715,485,122,724.64	1.007.289.799.685,44	1.149.611.294.222,74



Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Tahun Berjalan 2016	Proyeksi /Target pada Tahun 2017	Proyeksi /Target pada Tahun 2018
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja pegawai	35.906.166.100,00	92.731.228.875,00	93,658,541,163.75	180.023.145.252,00	
2.2.2	Belanja barang dan jasa	240.588.071.819,00	423.849.112.920,00	428,087,604,049.20	740.688.769.001,60	
2.2.3	Belanja modal	224.639.157.630,00	668.609.685.103,17	675,295,781,954.20	1.047.180.682.557,64	
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	501.133.395.549,00	1.185.190.026.898,17	1,197,041,927,167.15	1.967.892.596.811,24	
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	642.365.304.047,00	1.893.591.138.506,72	1,912,527,049,891.79	2.975.182.396.496,68	1.149.611.294.222,74
	Surplus/(Defisit)				(647.179.906.623,68)	1.232.244.748.008,86
3.1	Penerimaan pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	313.461.401.449,21	1.182.847.668.356,69	1,194,676,145,040.26	306.500.000.000,00	306.500.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				340.679.906.623,68	
E	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	313.461.401.449,21	1.182.847.668.356,69	1,194,676,145,040.26	647.179.906.623,68	306.500.000.000,00
3.2	Pengeluaran pembiayaan	0	0	0	0	0
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	0	0	0	0	0
3.2.3	Pembayaran pokok utang	0	0	0	0	0
F	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0
	Pembiayaan neto	1.184.448.975.515,69	1.182.847.668.356,69	1,194,676,145,040.26	647.179.906.623,68	306.500.000.000,00
G	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun rencana (SILPA)					306.500.000.000,00
H	PAGU ANGGARAN Belanja Langsung Perangkat Daerah = (G tahun lalu + A + E) – (B+F)					1.845.244.748.008,86

Sumber: Dispenda Provinsi Kalimantan Utara



Berdasarkan uraian diatas, maka kebijakan pengelolaan belanja daerah tahun 2017 diarahkan kepada :

1. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
2. Prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi urusannya.
3. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Besarnya plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja.
5. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).
6. Pemerintah Daerah dapat melakukan intervensi kebijakan belanja pada sektor-sektor strategis yang dapat mempengaruhi sistem dan mekanisme pasar secara menyeluruh.
7. Dalam kerangka kebijakan kemitraan swasta-pemerintah daerah untuk mendukung belanja daerah harus dilandasi kajian yang seksama terhadap masa produktif dan pembagian keuntungan yang didasari atas prinsip keadilan.

Adapun rencana belanja daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 adalah sebagai berikut:



Tabel 3. 4
Rencana Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Berdasarkan Usulan Renja Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Pagu indikatif	Prosentase
		Tahun 2017	%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	Pendidikan		
1.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	113,551,515,872.30	5,77
1.02	Kesehatan		
1.02.1	Dinas Kesehatan	38,578,405,000.00	1,96
1.02.2	RSUD Tarakan	72,450,000,000.00	3,68
1.02.3	RSUD (BLUD)	116,668,457,521.00	5,93
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	995,987,660,723.64	50,61
1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat		
1.05.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7,524,692,000.00	0,38
1.05.2	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	13,549,145,585.00	0,69
1.05.3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8,432,631,000.00	0,43
	Sosial		
1.06.1	Dinas Sosial	7,875,450,000.00	0,40
1.06.2	UPTD Panti Sosial Thresna Werdha Marga Rahayu	2,525,000,000.00	0,13
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.01	Tenaga Kerja		
2.01.1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5,013,045,000.00	0,25
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.02.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7,168,588,000.00	0,36
2.05	Lingkungan Hidup		
2.05.1	Dinas Lingkungan Hidup	7,000,000,000.80	0,36
2.06	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil		
2.06.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,130,110,560.00	0,31
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2.07.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7,698,047,800.00	0,39
2.09	Perhubungan		
2.09.1	Dinas Perhubungan	50,034,570,020.00	2,54
2.10	Komunikasi dan Informatika		
2.10.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	18,000,000,000.00	0,91
2.12	Penanaman Modal		
2.12.1	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	8,438,771,000.00	0,43
2.13	Pemuda dan Olahraga		
2.13.1	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	5,000,000,000.00	0,25
2.17	Perpustakaan		
2.17.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4,000,000,000.00	0,20
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.01	Kelautan dan Perikanan		
3.01.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	29,176,047,203.50	1,48
3.02	Pariwisata		
3.02.1	Dinas Pariwisata	8,211,340,000.00	0,42
3.03	Pertanian		
3.03.1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	17,554,060,000.00	0,89
3.04	Kehutanan		
3.03.1	Dinas Kehutanan	16,716,579,725.00	0,85



No	Perangkat Daerah	Pagu indikatif	Prosentase
		Tahun 2017	%
3.05	Energi dan Sumber Daya Mineral		
3.03.1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9,043,720,000.00	0,46
3.06	Perindustrian		
3.06.1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	11,000,000,000.00	0,56
4.01	Administrasi Pemerintahan		
4.01.3	Sekretariat Daerah	169,528,042,750.00	8,61
	Biro Pemerintahan	7,000,000,000.00	
	Biro Hukum	5,342,235,500.00	
	Biro Kesejahteraan Rakyat	11,960,000,000.00	
	Biro Perekonomian	7,767,910,000.00	
	Biro Pembangunan	5,932,628,750.00	
	Biro Organisasi	6,000,000,000.00	
	Biro Umum dan Perlengkapan	72,851,300,000.00	
	Biro Humas dan Protokol	48,150,329,000.00	
	Biro Pengelola Perbatasan	4,523,639,500.00	
4.01.4	Sekretariat DPRD	61,826,412,500.00	3,14
4.02	Pengawasan		
4.02.1	Inspektorat	12,754,013,000.00	0,65
4.03	Perencanaan		
4.03.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	26,916,212,500.00	1,37
4.04	Keuangan		
4.04.1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	45,594,134,000.00	2,32
4.04.2	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	24,435,918,550.00	1,24
4.05	Kepegawaian		
4.05.1	Badan Kepegawaian Daerah	12,314,640,000.00	0,63
4.06	Kepegawaian		
4.06.1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7,650,000,000.00	0,39
4.07	Penunjang Lainnya		
4.07.1	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	2,805,286,500.00	0,85
4.07.2	Badan Penghubung	16,740,100,000.00	0,14
TOTAL		1,967,892,596,811.24	100

Catatan:

Belanja Daerah terdiri dari Usulan Belanja Langsung, Usulan Sementara Hibah dan Bansos, serta Usulan Sementara Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota. Belum termasuk belanja pegawai, dan komponen belanja tidak langsung lainnya serta pengeluaran pembiayaan.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada



hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dari Tahun 2013-2015 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dengan jumlah SiLPA cenderung fluktuatif, dan selanjutnya diprediksikan akan semakin kecil. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

Kebijakan Pembiayaan Daerah akan diarahkan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah. Bersumber dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun 2017.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk perbaikan kinerja.